



Self Censorship dalam Kritik Kebijakan: Studi Kasus pada Kalangan Generasi Milenial dan Zilenial di Kota Palangka Raya pada Media Sosial Instagram

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Adithiya Wiradinatha Saputra Universitas Palangka Raya adithiya.wiradinathasaputra@fisip.upr.ac.id +6285349369015	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Febriomico Griando Rasan Universitas Palangka Raya febriomico.rasan@fisip.upr.ac.id +6285252944088	
Edward Melio Bertho Universitas Palangka Raya edward.mb@fisip.upr.ac.id +62895344401080	
Elsa Novianti Universitas Palangka Raya elsan5492@gmail.com +6282253389660	
Selmai Universitas Palangka Raya selmaimye@gmail.com +6282280866150	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Saputra, A. W., Rasan, F. G., Bertho, E. M., Novianti, E., & Selmai. (2026). Self Censorship dalam Kritik Kebijakan: Studi Kasus pada Kalangan Generasi Milenial dan Zilenial di Kota Palangka Raya pada Media Sosial Instagram. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 1929-1940.

Abstrak

Di era kontemporer, media sosial telah menjadi ruang utama masyarakat dalam memperoleh informasi, membangun opini, dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Namun, tingginya penggunaan media sosial tidak selalu diikuti dengan keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Banyak pengguna justru cenderung menjadi pengamat pasif karena adanya tekanan sosial, ketakutan terhadap respons negatif, serta kekhawatiran terhadap konsekuensi tertentu di ruang digital. Dalam laporan *We Are Social* dan *Meltwater* tahun 2025, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 180 juta pengguna atau sekitar 62,9% dari total populasi nasional, dengan Instagram menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya generasi milenial dan zilenial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena self-censorship dalam kritik kebijakan pada generasi milenial dan zilenial di Kota Palangka Raya melalui media sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi online dan wawancara mendalam terhadap 12 informan yang berdomisili di Kota Palangka Raya. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan teknik *open-ended interview* sehingga

informan dapat menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih mendalam. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram di Kota Palangka Raya tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi terkait isu kebijakan, politik, dan persoalan sosial, tetapi juga menjadi ruang untuk mengamati opini publik. Meskipun demikian, mayoritas generasi milenial dan zilenial cenderung menjadi pengamat pasif karena takut terhadap hujatan, dominasi opini mayoritas, risiko kesalahpahaman, konsekuensi hukum, serta kebutuhan menjaga citra diri dan relasi sosial. Self-censorship dilakukan melalui berbagai strategi, seperti memilih diam, menggunakan bahasa simbolis, membatasi interaksi di ruang publik, serta memindahkan diskusi ke ruang privat seperti *close friends*, *second account*, *direct message*, dan grup kecil. Fenomena ini berdampak pada menurunnya kualitas diskusi publik dan munculnya keseragaman opini semu di media sosial.

Kata Kunci: *Self-Censorship*, Kritik Kebijakan, Instagram, Milenial, Zilenial

Abstract

In the contemporary era, social media has become a primary platform for people to obtain information, form opinions, and express criticism of public policies. However, high social media usage does not always translate into public courage to express opinions openly. Many users tend to be passive observers due to social pressure, fear of negative responses, and concerns about certain consequences in the digital space. According to the We Are Social and Meltwater 2025 report, the number of social media users in Indonesia reached more than 180 million, or approximately 62.9% of the total national population, with Instagram being one of the most widely used platforms by the younger generation, particularly millennials and ziennials. This study aims to analyze the phenomenon of self-censorship in policy criticism among millennials and ziennials in Palangka Raya City through the social media platform Instagram. This study employed a qualitative case study method. Data collection was conducted through online observation and in-depth interviews with 12 informants residing in Palangka Raya City. Informants were selected using a purposive sampling technique. Interviews were conducted semi-structured using open-ended techniques, allowing informants to explain their experiences and perspectives in greater depth. Data analysis employed the Miles & Huberman model, which encompasses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data was tested through source triangulation, technical triangulation, and member checking. The results indicate that Instagram in Palangka Raya City is not only used as a source of information on policy, political, and social issues, but also as a platform for observing public opinion. However, the majority of millennials and ziennials tend to be passive observers due to fear of criticism, the dominance of majority opinion, the risk of misunderstanding, legal consequences, and the need to maintain self-image and social relationships. Self-censorship is carried out through various strategies, such as choosing silence, using symbolic language, limiting interactions in public spaces, and moving discussions to private spaces such as close friends, second accounts, direct messages, and small groups. This phenomenon has resulted in a decline in the quality of public discussions and the emergence of a false uniformity of opinion on social media.

Key Words: Self-Censorship, Policy Criticism, Instagram, Millennials, Ziennials

A. Pendahuluan

Perkembangan media sosial, khususnya Instagram, telah mengubah cara masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan publik. Platform ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga arena diskursus publik yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk generasi milenial dan zilenial yang dikenal aktif secara digital. Namun, di balik tingginya partisipasi tersebut, muncul fenomena *self-censorship* atau penyensoran diri, yaitu kecenderungan individu untuk menahan atau membatasi ekspresi pendapatnya karena berbagai pertimbangan, seperti tekanan sosial, norma, maupun kekhawatiran terhadap konsekuensi tertentu. Penyensoran diri di ruang digital terjadi ketika individu

mempertimbangkan nilai sosial, norma budaya, serta potensi risiko sebelum mengungkapkan opininya di media sosial (Anom & Rassanjani, 2026).

Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam konteks kritik terhadap kebijakan publik, di mana kebebasan berpendapat seringkali dihadapkan pada batasan sosial maupun psikologis. Generasi milenial dan zilenial sebagai kelompok yang tumbuh bersama teknologi digital memiliki karakteristik unik dalam berkomunikasi, namun juga rentan terhadap tekanan sosial di ruang digital, seperti *fear of backlash*, *cancel culture*, atau stigma sosial. Interaksi di media sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh norma sosial, regulasi, serta tanggung jawab sosial, sehingga dapat memengaruhi keberanian individu dalam menyampaikan opini politik atau kritik kebijakan (Nurlatifah et al., 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *self-censorship* memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik di media sosial. Ditemukan bahwa individu cenderung menahan opini ketika merasa pandangannya berpotensi menimbulkan kontroversi atau tidak sejalan dengan arus utama di ruang publik digital (Juditha, 2025). Ditemukan pula bahwa pengguna media sosial sering melakukan penyensoran diri karena kekhawatiran terhadap reaksi negatif dari audiens, terutama dalam isu-isu sensitif seperti politik dan kebijakan publik (Hermawan et al., 2026). Namun, kedua penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada konteks umum media sosial dan belum secara spesifik mengkaji fenomena ini pada kelompok generasi tertentu serta dalam konteks lokal Indonesia.

Selain itu, adapula studi tentang *Self-Disclosure* mahasiswa yang menunjukkan bahwa pengguna mengekspresikan diri di media sosial secara selektif dan hati-hati, dengan tingkat keterbukaan yang dipengaruhi kepercayaan diri, pengelolaan citra, interaksi dengan audiens (Rahmad et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa generasi milenial lebih berhati-hati dalam berbagi informasi dibandingkan generasi Z, yang lebih responsif dan ekspresif (Ridho & Saepudin, 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa keputusan untuk membagikan konten personal di Instagram dipengaruhi oleh motif mencari pengakuan dan mengalami pengalaman sosial tertentu, tetapi pengguna juga menahan beberapa konten untuk menghindari rasa cemas atau komentar negatif dari audiens (Firmansyah et al., 2024). Temuan-temuan ini menegaskan keterkaitan antara pengungkapan diri dan *self-censorship* dalam praktik penggunaan Instagram oleh generasi milenial dan Z di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana fenomena *self-censorship* terjadi pada generasi milenial dan zilenial, khususnya di Kota Palangka Raya, dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik melalui Instagram. Kota Palangka Raya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat penggunaan teknologi digital yang tinggi dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 88,29% penduduk Kota Palangka Raya usia 5 tahun ke atas telah mengakses internet, sekaligus menjadi persentase pengguna internet tertinggi di Kalimantan Tengah. Selain itu, 88,12% penduduk Kota Palangka Raya memiliki atau menguasai telepon seluler, menunjukkan tingginya intensitas penggunaan perangkat digital dalam aktivitas sehari-hari masyarakat (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024).

Tingginya akses internet dan penggunaan perangkat digital tersebut menjadikan media sosial, khususnya Instagram, sebagai ruang komunikasi yang relevan bagi generasi muda dalam menyampaikan opini, kritik, maupun partisipasi terhadap isu kebijakan publik. Namun, tingginya aktivitas digital tidak selalu berbanding lurus dengan keberanian dalam berekspresi, karena individu juga dapat mengalami kekhawatiran terhadap respons sosial, penilaian publik, atau potensi konflik di ruang digital. Kondisi ini menjadikan Kota Palangka Raya sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji fenomena *self-censorship*, mengingat tingginya tingkat penggunaan internet dan media sosial yang mencapai sekitar 88% penduduk, namun belum tentu diikuti oleh keterbukaan pengguna dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk dan faktor penyebab *self-censorship* pada generasi milenial dan zilenial pengguna Instagram di Kota Palangka Raya serta dampaknya terhadap partisipasi mereka dalam diskursus publik.

Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena *self-censorship* dalam kritik kebijakan pada generasi milenial dan zilenial di Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi munculnya perilaku tersebut dalam penggunaan media sosial Instagram. Adapun kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menggabungkan aspek generasi (milenial dan zilenial), konteks lokal (Kota Palangka Raya), serta platform spesifik (Instagram) dalam menganalisis fenomena *self-censorship*, yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus utamanya adalah memahami pengalaman nyata individu ketika memiliki keinginan untuk mengkritik kebijakan tetapi memilih menahan diri (*self-censorship*). Pendekatan studi kasus dipilih agar peneliti dapat menggali fenomena tersebut secara kontekstual, mendalam, dan holistik, khususnya dalam konteks kehidupan digital masyarakat. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Palangka Raya yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Mereka terdiri dari dua kelompok generasi, yaitu generasi milenial (26–45 tahun) dan generasi zilenial (17–25 tahun). Kriteria informan meliputi individu yang aktif menggunakan Instagram serta pernah mengalami situasi di mana mereka ingin mengkritik kebijakan namun memilih untuk menahan diri. Sebanyak 12 informan (6 dari generasi milenial dan 6 dari generasi zilenial) dilibatkan dalam penelitian ini. Jumlah ini dianggap memadai untuk menghasilkan data yang kaya dan mendalam, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif dan tujuan eksploratif dalam studi kasus.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi online. Wawancara ini pada dasarnya disusun dengan panduan, sehingga dapat dikategorikan sebagai semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara *open-ended*, sehingga pertanyaan dapat berkembang mengikuti respons informan. Meskipun demikian, proses wawancara tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun agar tetap berada dalam batas fokus penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti menggali pengalaman pribadi informan terkait ketakutan dalam mengkritik, menanyakan contoh konkret momen ketika mereka menahan diri, serta menelusuri berbagai faktor yang memengaruhi munculnya rasa takut tersebut. Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku pengguna Instagram dalam merespons isu kebijakan, khususnya melalui komentar dan unggahan. Peneliti memperhatikan pola-pola tertentu, seperti penggunaan fitur close friends, akun yang bersifat private, atau kecenderungan untuk tidak memberikan komentar pada postingan publik. Hasil observasi ini digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik *self-censorship* di media sosial.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk yang terorganisir agar memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus dan disertai proses verifikasi untuk memastikan keakuratan hasil penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik yang paling relevan yaitu triangulasi sumber, dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Triangulasi teknik, dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara dan observasi untuk melihat konsistensi temuan. Member check, dimana peneliti meminta informan untuk mengecek kembali/peneliti menanyakan hasil interpretasi peneliti guna memastikan bahwa data yang disajikan telah sesuai dengan pengalaman dan maksud yang mereka sampaikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Instagram sebagai Sumber Informasi dan Ruang Mengamati

Instagram menjadi salah satu sumber informasi utama bagi generasi milenial dan zilenial di Kota Palangka Raya untuk mengikuti isu kebijakan, politik, dan persoalan sosial yang sedang berkembang. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar informan menggunakan Instagram untuk melihat berita, melihat unggahan kebijakan pemerintah, memantau opini publik, membaca komentar, serta mengikuti isu yang sedang ramai dibicarakan. Instagram dipandang sebagai media yang cepat dalam menyebarkan informasi sehingga memudahkan mereka mengikuti isu yang sedang ramai dibicarakan. Namun, mayoritas informan lebih memilih menjadi pengamat dibanding terlibat langsung dalam diskusi publik. Mereka cenderung membaca komentar terlebih dahulu untuk melihat respons masyarakat terhadap suatu isu sebelum menentukan sikap atau memilih diam.

Pada generasi milenial, kecenderungan menjadi pembaca pasif terlihat cukup dominan. Informan mengatakan bahwa mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena khawatir menimbulkan konflik, kesalahpahaman, hingga dampak pada citra diri dan

pekerjaan, terutama bagi informan yang bekerja sebagai PNS maupun pegawai swasta. Hal ini terlihat dari pernyataan salah satu informan Dayun Golik (45 tahun) yang berprofesi sebagai ASN.

"Karena profesi, saya harus lebih menjaga sikap. Sekarang kalau mau bicara saya pasti berpikir dulu. Apalagi kalau topiknya masalah politik atau pemerintah, saya lebih baik membatasi diri, cukup membaca saja untuk pribadi."

Beberapa informan juga memilih hanya membagikan berita tanpa menambahkan opini pribadi, sementara pendapat yang berbeda lebih sering disampaikan melalui grup *WhatsApp* kecil atau percakapan langsung dengan teman dekat/keluarga. Sikap tersebut menunjukkan adanya *self-censorship* atau penyensoran diri dalam penggunaan media sosial dimana pengguna media sosial cenderung memilih diam ketika merasa opininya berbeda dengan mayoritas (Putri et al., 2026).

Generasi milenial juga menggunakan Instagram untuk mengikuti isu politik dan kebijakan melihat berita, membaca komentar, maupun *repost* informasi di *story*. Akan tetapi, mereka mengaku lebih nyaman menyampaikan pendapat/kritik di ruang privat seperti *close friends*, *second account*, atau *direct message*. Meskipun kritik terhadap kebijakan sering mendapat dukungan dari sebagian pengguna, mereka tetap merasa khawatir karena media sosial juga dipenuhi perdebatan, serangan personal, dan risiko disalahpahami oleh pihak yang tidak sependapat (Riyanti et al., 2026). Ketika melihat pengguna lain menerima hujatan atau komentar negatif setelah menyampaikan kritik, mereka menjadi takut ikut berkomentar dan akhirnya memilih diam. Rasa waswas terhadap serangan digital dan penghakiman dari pengguna lain di ruang terbuka ini dikonfirmasi oleh Indra Heriyanto (21 tahun), informan yang merupakan seorang mahasiswa melalui pengalamannya saat berinteraksi di Instagram.

"Waktu itu ada kebijakan kampus yang sempat viral, rame lah, saya sebenarnya mau komentar. Tapi setelah dipikir lagi, saya takut komentar saya nantinya menciptakan respons negatif yang menghujat saya. Jadinya saya milih untuk tidak jadi komen."

Hal ini menunjukkan bahwa opini mayoritas di media sosial dapat menciptakan tekanan sosial yang membuat pengguna lain enggan menyampaikan kritik secara terbuka.

Instagram tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk mengamati dinamika opini publik dan perilaku masyarakat dalam merespons isu kebijakan dan politik. Namun, kuatnya tekanan sosial, dominasi opini mayoritas, dan budaya judgment membuat banyak pengguna lebih nyaman menjadi pengamat pasif dibanding menyampaikan pendapat secara terbuka di media sosial.

Faktor Penyebab Self-Censorship di Instagram

1. Ketakutan terhadap Penilaian Sosial dan Serangan Netizen

Sebagian besar informan mengaku lebih memilih diam ketika melihat isu kebijakan atau politik di Instagram karena khawatir akan mendapat hujatan, komentar negatif, maupun serangan dari pengguna lain yang lebih mendukung pemerintah. Instagram merupakan ruang publik yang sangat terbuka sehingga setiap opini dapat dengan mudah diperdebatkan bahkan disalahartikan (Kartodinoto et al., 2024). Ketakutan tersebut membuat banyak orang membatasi diri untuk ikut berdiskusi secara langsung di kolom komentar maupun unggahan publik. Hambatan psikologis berupa kekhawatiran dicap negatif diungkapkan oleh informan dari generasi milenial Hary Martiningsih (45 tahun), seorang Ibu Rumah Tangga.

"Pernah. Waktu itu kalau ga salah tentang kenaikan harga bahan pokok, cabai kayanya. Saya mau komen, tapi ga jadi karena ya takut, takut dibilang bisanya cuma nyalahin pemerintah aja."

Selain takut dihujat, mereka juga merasa khawatir apabila pendapat yang mereka sampaikan dianggap salah, terlalu berlebihan, atau bahkan dianggap sok tahu oleh pengguna lain. Kondisi ini terlihat pada saat informan generasi muda menceritakan pengalamannya yang sering mengurungkan niat untuk berkomentar karena takut mendapat penilaian negatif dari lingkungan sosialnya. Akibatnya, mereka lebih memilih menjadi pembaca pasif, hanya memberikan reaction berupa emoji, atau menyampaikan opini di ruang yang lebih privat seperti *close friends*, *direct message*, secara langsung dengan teman dekat, atau grup *WhatsApp* kecil.

2. Ketakutan Akan Terjerat Hukum

Kekhawatiran ini muncul karena adanya persepsi bahwa kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik dapat berujung pada pelaporan hukum, terutama melalui regulasi yang

dianggap memiliki tafsir luas terhadap ujaran di ruang digital. Kondisi tersebut membuat banyak pengguna media sosial memilih untuk membatasi opini, menghapus unggahan tertentu, atau meplesetkan bahasa agar terhindar dari potensi konsekuensi hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang digital yang seharusnya menjadi sarana partisipasi publik justru menghadirkan rasa waswas bagi sebagian generasi muda dalam mengekspresikan pandangan kritis mereka (Ihzan, 2025).

Selain itu, ketakutan terhadap konsekuensi hukum juga dipengaruhi oleh maraknya pemberitaan mengenai kasus-kasus pelaporan pengguna media sosial akibat unggahan yang dianggap melanggar aturan. Informasi tersebut membentuk persepsi bahwa aktivitas kritik di Instagram memiliki risiko yang tinggi, terutama ketika dilakukan secara terbuka dan menggunakan identitas pribadi. Akibatnya, generasi milenial dan zilenial cenderung mempertimbangkan secara berlebihan isi, bentuk, hingga waktu publikasi kritik yang akan disampaikan.

3. Pengaruh Opini Mayoritas dan Jumlah Likes

Dominasi opini mayoritas dan tingginya jumlah *likes* pada sebuah postingan sering kali membentuk persepsi bahwa pandangan tersebut merupakan opini yang paling benar atau paling diterima secara sosial. Ketika sebuah postingan memperoleh banyak dukungan, pengguna lain cenderung melihatnya sebagai standar yang seharusnya diikuti. Kondisi ini telah menciptakan dinamika kritik kebijakan yang membuat pengguna merasa tidak nyaman untuk menyampaikan pandangan yang berbeda karena khawatir dianggap menyimpang dari arus utama. Pengaruh *likes*, komentar, dan repost tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur keterlibatan, tetapi juga menjadi sumber tekanan sosial yang mendorong terjadinya *self-censorship*. Fenomena ini berkaitan dengan konsep spiral of silence, ketika individu cenderung diam karena merasa pandangannya berada pada posisi minoritas (Putri et al., 2026). Fenomena keheningan yang dipicu oleh dominasi arus opini mayoritas di kolom komentar ini secara jelas digambarkan oleh pernyataan Teguh Saputra (20 tahun), salah satu informan mahasiswa.

"Iya. Kalau ngeliat komentar yang kelihatannya pro dengan suatu isu dan dapat banyak likes, saya merasa pendapat saya jadi kaya minoritas dan ga mungkin bakal diliat. Jadinya saya malas buat ngasih pendapat."

Akibat hal ini, ruang diskusi di media sosial menjadi tidak seimbang dan hanya menampilkan satu arus opini yang dominan. Kondisi ini dapat mengurangi keberagaman pandangan dan membuat isu-isu penting lebih mudah dipersepsikan secara bias. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan digital yang lebih inklusif dan memberikan ruang aman bagi berbagai pandangan, termasuk fitur atau pendekatan yang memungkinkan penyampaian opini tanpa tekanan sosial yang berlebihan (Putri et al., 2026).

4. Faktor Pekerjaan, Relasi Sosial, dan Citra Diri

Pegawai negeri, pegawai swasta, maupun individu dengan posisi profesional tertentu cenderung merasa perlu menjaga citra dan kredibilitas diri. Unggahan atau komentar terkait isu sensitif dipandang berpotensi memengaruhi penilaian publik terhadap kompetensi maupun integritas mereka. Akibatnya, banyak pengguna memilih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, menggunakan bahasa yang lebih netral, atau bahkan menghindari diskusi kebijakan agar reputasi profesional tetap terjaga. Kekhawatiran akan integritas kerja diakui oleh pekerja swasta seperti Kharisma Yakobus yang melakukan *self-censorship* demi menjaga reputasi di lingkungan kerjanya.

"Saya sudah kerja, jadi lebih menjaga image di publik dan lebih hati-hati, agar pekerjaan saya tetap aman."

Dalam hal ini, *self-censorship* berfungsi sebagai perlindungan diri terhadap risiko sosial maupun risiko karier yang mungkin timbul dari aktivitas online. Keinginan menjaga citra diri di media sosial berkaitan dengan *fear of negative evaluation*, yaitu rasa takut memperoleh penilaian negatif dari lingkungan sosial maupun profesional (Hernawati & Putri, 2025).

Selain pekerjaan, relasi sosial seperti hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan komunitas sekitar juga menjadi faktor yang memperkuat kecenderungan untuk melakukan *self-censorship*. Keberagaman sifat dalam satu ruang digital membuat pengguna lebih mempertimbangkan dampak sosial dari setiap opini yang disampaikan. Kekhawatiran akan munculnya konflik, penilaian negatif, atau ketegangan dalam hubungan personal mendorong sebagian orang untuk membatasi ekspresi mereka di ruang publik Instagram. Sehingga, upaya menjaga citra diri dan harmoni sosial menjadi alasan utama mengapa *self-censorship* tetap kuat

terjadi dalam praktik komunikasi digital generasi milenial dan zilenial. Generasi zilenial seperti Cantika menghadapi tekanan relasional, Cantika mengatakan

"Followers aku isinya macam-macam, ada teman, keluarga, dosen juga ada. Itu yang bikin aku takut kalo mau komen atau posting sesuatu, apalagi kalau tentang kampus."

Bahkan bagi remaja seperti Oktaviani, ruang digital Instagram masih berada di bawah bayang-bayang pengawasan orang tuanya, Oktaviani mengatakan *"Waktu itu ada masalah tentang proyek daerah, aku pengen komen. Tapi takut dimarahin orang tua kalau lihat."*

Strategi Self-Censorship yang Sering Dilakukan

Strategi *self-censorship* yang paling sering dilakukan generasi milenial dan generasi zilenial di Kota Palangka Raya adalah memilih diam dan menjadi pengamat pasif dalam diskusi kebijakan atau isu politik di Instagram. Mereka lebih memilih membaca dan memantau isu tanpa ikut berkomentar karena takut dihujat, dianggap provokatif, atau mendapat penilaian negatif dari netizen, keluarga, lingkungan kampus, maupun rekan kerja. Selain memilih diam, mereka juga terkadang sering menggunakan bahasa yang lebih halus dan tidak terlalu langsung, misalnya dengan meme atau candaan sarkatik dalam komentar. Pilihan untuk memperhalus narasi kritik melalui simbol visual atau sindiran halus menjadi strategi informan agar pesannya tetap tersampaikan secara aman, seperti yang disampaikan oleh informan Cantika Febriana.

"Aku biasanya bikin teks kecil di pojokan storyku, atau pakai emoji buat komen atau reaction postingan. Kadang juga aku bikin "rant" tapi cuma di close friends aja."

Hal ini secara langsung menyatakan bahwa sindiran atau candaan dapat membuat pesan kritik terasa lebih ringan. Terkadang mereka juga memilih hanya membagikan berita tanpa menambahkan *caption* atau opini pribadi agar tetap dapat mengikuti isu tanpa terlihat terlalu berpihak atau terlibat dalam perdebatan publik.

Penggunaan emoji dan *reaction* juga menjadi bagian dari strategi *self-censorship* yang sering dilakukan. Pengguna Instagram merasa lebih nyaman menggunakan emoji untuk menunjukkan perasaan atau respons terhadap suatu isu tanpa harus menyampaikan pendapat secara langsung. Emoji dianggap lebih aman karena bersifat simbolis dan tidak terlalu terbuka dibanding komentar secara langsung di kolom publik. Selain itu, informan juga menyatakan lebih memilih memberikan respons melalui *close friends*, *direct message* (DM), atau grup kecil karena dianggap lebih privat dan minim risiko konflik. Hal ini menunjukkan bahwa *self-censorship* tidak selalu dilakukan dengan diam, tetapi juga melalui cara komunikasi yang lebih samar dan simbolis agar pendapat tetap dapat disampaikan dengan aman.

Strategi *self-censorship* lainnya ialah memanfaatkan fitur-fitur Instagram untuk membatasi penyampaian pendapat. Fitur *close friends* menjadi salah satu pilihan utama karena hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu sehingga informan merasa lebih bebas menyampaikan opini atau kritik tanpa takut mendapat penilaian negatif dari publik luas. Hal ini terlihat dari salah satu pernyataan cantika.

"Aku biasanya posting sesuatu itu di story close friends karena kan lebih sedikit juga orang yang liat, teman-teman dekatku aja, jadi rasanya lebih aman. Aku ga mau ambil risiko untuk posting secara terbuka."

Penggunaan fitur ini menunjukkan adanya kecenderungan memindahkan diskusi mengenai kebijakan dan politik dari ruang publik ke ruang yang lebih privat (Wahyudi & Nugroho, 2022).

Selain itu, *second account* juga sering sekali digunakan agar pengguna Instagram lebih leluasa menyampaikan pendapat tanpa terlalu terhubung dengan identitas utama, lingkungan kerja, maupun keluarga. Cara tersebut dilakukan untuk menjaga reputasi dan mengurangi risiko sosial akibat unggahan di media sosial. Hal ini disampaikan oleh Candi Satrio (21 Tahun), informan yang merupakan seorang mahasiswa.

"Aku biasanya pakai second account yang nggak ada nama atau foto asliku. Biasanya di second account aku bukan buat komen, tapi kaya repost suatu postingan atau buat story yang kukasih caption pendapatku. Jadi kalau ada yang nge-judge, nggak ngefek."

Fitur *story* juga dianggap lebih aman dibanding *feed* karena bersifat sementara dan hanya bertahan selama 24 jam. Banyak pengguna Instagram menggunakan *story* untuk menyampaikan kritik secara halus, sindiran, maupun repost informasi tanpa komentar tambahan/*caption*. Namun, ketika unggahan mulai memicu respons negatif atau perdebatan, mereka bisa menghapus *story* atau unggahan tersebut sebagai bentuk perlindungan diri. Beberapa informan

terkadang juga melakukan penyensoran terhadap nama pejabat, lembaga, atau institusi dengan cara menyamarkan atau tidak menyebutkannya secara langsung agar mereka terhindar dari masalah hukum. Berbagai strategi *self-censorship* yang dilakukan informan menunjukkan adanya upaya untuk tetap dapat mengikuti dan merespons isu kebijakan di Instagram, tetapi dengan cara yang dianggap lebih aman, terkontrol, dan minim risiko sosial.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa di Palangka Raya Instagram dianggap sebagai ruang yang kurang aman untuk membahas isu kebijakan dan politik. Pandangan ini muncul karena adanya budaya menghakimi yang kuat, di mana opini seseorang dapat dengan mudah diserang, disalahpahami, atau dinilai negatif oleh pengguna lain, termasuk dari lingkungan keluarga maupun pekerjaan. Selain itu, sering kali kita melihat persoalan hukum kerap muncul karena kritik yang disampaikan masyarakat melalui media sosial. Algoritma Instagram yang memungkinkan suatu unggahan cepat menjadi viral juga menambah kekhawatiran dalam menyampaikan pendapat. Kondisi ini membuat banyak orang lebih memilih untuk menjadi pengamat pasif daripada terlibat langsung dalam diskusi terbuka.

Selain itu, Instagram juga dipandang sebagai ruang yang mudah memicu konflik. Informan menyatakan sering melihat interaksi yang memanas, komentar negatif, hingga serangan antar pengguna yang membuat mereka merasa tidak nyaman untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Risiko salah paham terhadap unggahan atau komentar juga menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama karena informasi di media sosial dapat dengan cepat menyebar dan menjadi viral (Fatimah, 2025). Hal-hal tersebut membuat informan semakin berhati-hati dan cenderung menahan diri dalam memberikan opini terkait isu kebijakan di ruang publik Instagram.

Akibat kondisi tersebut, diskusi publik di Palangka Raya lebih banyak berlangsung di circle kecil dibanding ruang publik terbuka. Banyak individu memindahkan diskusi mengenai kebijakan dan isu politik ke ruang yang lebih privat seperti grup *WhatsApp* kecil, DM, *close friends*, *second account*, maupun percakapan langsung dengan teman dekat/keluarga/pasangan saja. Ruang-ruang ini dianggap lebih aman karena hanya melibatkan orang-orang tertentu sehingga risiko konflik dan penilaian publik dapat diminimalkan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa ruang privat menjadi alternatif utama bagi informan untuk tetap berdiskusi secara lebih bebas tanpa harus menghadapi tekanan sosial yang kuat di Instagram sebagai ruang publik (Sutono & Noorzeha, 2025). Fenomena sepinya ruang publik di Palangka Raya ini ditegaskan oleh Indra Heriyanto yang mengatakan

"Di ruang publik itu agak jarang. kami lebih banyak bicara dalam circle pertemanan aja, dan di situ kami bicara lebih santai."

Kondisi serupa juga diakui oleh Dayun Golik yang mengatakan:

"Memang jarang sekali masalah kebijakan dibahas secara terbuka. Kalau pengalaman saya biasanya kami lebih banyak bicara di grup WhatsApp dan secara langsung dalam pertemanan saya aja."

Dalam media sosial seperti Instagram, banyak pengguna cenderung memilih diam ketika menghadapi isu-isu sensitif. Sikap ini muncul karena adanya kekhawatiran akan potensi hujatan dari orang lain. Ketakutan tersebut membuat individu lebih berhati-hati dalam mengekspresikan pandangan, sehingga diskusi publik sering kali terlihat seragam dan kurang berkembang. Ketika semakin banyak orang memilih untuk tidak bersuara, ruang dialog menjadi terbatas dan perspektif kritis sulit muncul. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik di media sosial masih belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi pengguna untuk menyampaikan opini yang berbeda. Di Palangka Raya *circle* pertemanan terbilang kecil, sehingga memperkuat kecenderungan tersebut. *Circle* pertemanan yang saling terhubung membuat seseorang lebih mudah menjadi bahan pembicaraan ketika menyampaikan pendapat/postingan yang tidak sesuai dengan pandangan umum. Akibatnya, banyak orang memilih untuk berpendapat di ruang privat. Strategi ini dianggap lebih aman untuk menjaga citra diri, menghindari konflik, serta memelihara hubungan sosial di lingkungan sekitar.

Dampak Self-Censorship terhadap Diskusi Publik

Self-censorship memiliki dampak besar terhadap berkurangnya kritik kebijakan di ruang publik Instagram. Banyak pengguna memilih diam, sekadar menjadi pembaca pasif, atau menyampaikan pendapatnya di ruang privat. Kondisi ini membuat kritik terhadap kebijakan tidak berkembang secara optimal, sehingga ruang diskusi yang seharusnya dapat menjadi wadah evaluasi publik justru dipenuhi ekspresi yang terbatas. Selain itu, *self-censorship* menyebabkan diskusi publik menjadi kurang dinamis dan tidak berkembang. Ketika masyarakat cenderung berhati-hati dalam menyampaikan pandangan yang berbeda, berbagai isu penting

hanya dibahas secara dangkal dan tidak benar-benar diperbincangkan secara mendalam. Ruang diskusi pun dipenuhi pandangan yang dianggap aman atau sesuai dengan arus utama, sehingga perspektif alternatif sulit muncul. Hal ini membuat banyak pendapat minoritas tidak mendapat ruang untuk diperhatikan, bahkan sering kali hanya dibicarakan secara terbatas dalam *circle* kecil atau ruang privat.

Dampak lebih jauh dari fenomena ini adalah munculnya keseragaman opini yang bersifat semu. Ketika banyak pengguna memilih diam saja, isu publik cenderung dipahami hanya dari satu sudut pandang yang paling dominan dibahas, sehingga keberagaman gagasan tidak terlihat di ruang publik. Situasi tersebut menciptakan ilusi bahwa mayoritas masyarakat memiliki pandangan yang sama, seolah-olah seluruh masyarakat menyepakati suatu kebijakan, meskipun sebenarnya terdapat perbedaan pendapat yang tidak diungkapkan. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan bernama Wayan Wirawan (35 Tahun), seorang ASN.

"Ya situasinya jadi misleading atau menyesatkan, seolah-olah kita melihat semua orang setuju, padahal banyak yang sebenarnya tidak setuju hanya saja tertutupi karena tidak berani menyampaikan pendapat. Banyak orang yang diam membuat diskusi publik terlihat tidak berkembang."

Pada akhirnya, rasa takut terhadap respons negatif di media sosial akan membatasi wacana publik dan mengurangi keberagaman pendapat yang seharusnya hadir dalam diskusi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa fitur anonim dipandang sebagai salah satu mekanisme yang dapat meningkatkan keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat mengenai kebijakan maupun isu politik di Instagram. Anonimitas memberikan jarak antara identitas pribadi dan pendapat yang disampaikan, sehingga pengguna merasa lebih terlindungi dari risiko hujatan, penilaian buruk, atau kesalahpahaman. Dengan adanya perlindungan ini, individu lebih bebas mengemukakan kritik, termasuk pandangan yang berbeda dari arus utama, tanpa khawatir terhadap dampak reputasi, hukum, atau tekanan sosial (Simamora et al., 2025). Dalam ruang publik digital, anonimitas mampu menciptakan kondisi yang lebih aman bagi pengguna untuk mengekspresikan pandangan secara jujur, terutama ketika isu yang dibahas bersifat sensitif dan rawan menimbulkan perdebatan (Hasfi et al., 2018). Keinginan akan adanya fitur anonimitas resmi ini disuarakan oleh generasi yang lebih muda, seperti Teguh Saputra yang mengatakan

"Mungkin kalau ada fitur anonim terus juga banyak orang sama pendapatnya, baru aku mau ikut berpendapat."

Dan pernyataan Kharisma Yakobus juga mendukung hal tersebut:

"Saya mungkin akan ikut bersuara kalau orang mudah untuk menerima pendapat yang berbeda. Sama kalau ada fitur yang bisa bikin pendapat lebih anonim itu lebih baik."

Selain peran fitur platform anonim, keberanian berpendapat juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan tingkat dukungan dari orang-orang terdekat. Lingkungan pertemanan yang memberikan dukungan emosional dapat meningkatkan rasa percaya diri pengguna untuk berbicara lebih terbuka (Adzhani et al., 2020). Respons positif dari mutual, *circle* kecil dengan pandangan serupa, serta ruang diskusi privat seperti *close friends* atau grup kecil sering kali dianggap sebagai tempat yang lebih aman dibandingkan ruang publik Instagram. Hal ini diakui secara gamblang oleh Cantika Febriana mengenai kenyamanan di fitur *close friends*.

"Close friends. Lebih aman, dan yang lihat cuma teman dekat ku aja."

Lingkungan yang menghargai perbedaan pendapat dan tidak mudah memberikan penilaian negatif dapat menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pandangannya (Rachmawati & Nurhamida, 2018). Dengan begitu, keberanian untuk berpendapat bukan hanya bergantung pada fitur teknis media sosial, tetapi juga pada kualitas interaksi sosial yang mendukung terciptanya ruang dialog yang inklusif dan toleran.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Instagram menjadi salah satu sumber informasi utama bagi generasi milenial dan zilenial di Kota Palangka Raya dalam mengikuti isu kebijakan, politik, dan persoalan sosial. Namun, meskipun mereka aktif mengamati informasi, mayoritas tidak berani terlibat dalam diskusi publik. Fenomena ini terjadi karena kuatnya *self-censorship* akibat tekanan sosial, ketakutan terhadap hujatan, risiko salah paham, kekhawatiran terhadap sanksi hukum, serta dominasi opini mayoritas yang menciptakan persepsi bahwa pandangan berbeda dapat memicu konflik. Pengguna lebih memilih menjadi pengamat pasif atau memindahkan

diskusi ke ruang-ruang privat seperti *close friends*, DM, *second account*, diskusi langsung dengan teman/keluarga/pasangan, dan grup kecil di WhatsApp. Faktor pekerjaan, citra diri, serta relasi sosial memperkuat dorongan untuk membatasi diri dalam mengungkapkan pandangan secara terbuka, sehingga ruang publik Instagram tidak mencerminkan keberagaman opini yang sebenarnya ada.

Fenomena ini berdampak pada menurunnya kualitas diskusi publik karena kritik dan pandangan alternatif tidak berkembang di ruang terbuka. Dinamika opini di Instagram menjadi seragam secara semu, padahal banyak pendapat minoritas yang tertahan karena rasa takut akan respon negatif. *Spiral of silence* terlihat kuat, di mana individu memilih diam karena merasa opini mereka bertentangan dengan pandangan mayoritas atau dapat menimbulkan konflik sosial. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa fitur anonimitas serta dukungan dari lingkungan pertemanan yang positif dan lingkungan sosial yang menghargai perbedaan pendapat dapat membantu meningkatkan keberanian pengguna untuk menyampaikan pendapat secara lebih jujur dan bebas dari ketakutan sosial maupun profesional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya membangun ruang digital yang lebih aman dan inklusif agar pengguna tidak takut menyampaikan opini. Transparansi regulasi mengenai batasan ujaran di ruang digital perlu diperjelas untuk mengurangi kecemasan masyarakat terhadap konsekuensi hukum. Selain itu, lingkungan sosial, baik dalam lingkup pertemanan, keluarga, kampus, maupun pekerjaan, perlu menumbuhkan budaya berdiskusi yang saling menghargai perbedaan pandangan. Platform media sosial juga diharapkan dapat mengembangkan fitur-fitur anonim yang tetap bertanggung jawab, karena anonimitas terbukti dapat memberikan perlindungan emosional dan sosial bagi pengguna yang ingin menyampaikan kritik atau pendapat sensitif tanpa merasa terancam oleh penilaian publik. Dengan demikian, Instagram dan media sosial lainnya dapat menjadi ruang publik yang memungkinkan dialog kritis berkembang tanpa tekanan sosial yang berlebihan, sehingga keberagaman perspektif benar-benar terlihat dan dapat berkontribusi pada dinamika demokrasi yang lebih sehat.

E. Referensi

- Adzhani, S. N., Baihaqi, M. I. F., & Kosasih, E. (2020). Persepsi Dukungan Sosial sebagai Mediator Pengungkapan Diri dan Kesejahteraan Subjektif pada Pengguna Instagram. *MEDIAPSI*, 6(1), 60–70.
- Anom, E., & Rasanjani, S. (2026). Digital ethics , cultural values , and self-regulation of social media activities in Indonesia and Malaysia. *Frontiers in Communication*, 1–9. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2026.1745680>
- Artini. (2018). Self Censorship dan Tanggung Jawab Sosial Media Massa. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 111–126.
- Aulia, N., Gunawan, W., & Yunita, D. (2024). Proses Pembentukan Citra Diri Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Akun Selebgram @Roro_Yustina). *Jurnal Sosiologi Nusantara (JSN)*, 10(1), 65–81. <https://doi.org/10.33369/jsn.10.1.65-81>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2024*.
- Bar-tal, D. (2017). Self-Censorship as a Socio-Political-Psychological Phenomenon : Conception and Research. *Advances in Political Psychology*, 38(1), 37–65. <https://doi.org/10.1111/pops.12391>
- Fatimah, S. (2025). Transformasi Ruang Publik Digital : Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 67–86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>
- Firmansyah, Kurniawan, A. W., & Sukmawati, I. (2024). Instagram story sebagai media self disclosure. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 10(1), 141–163.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere* (berilustrasi, cetak ulang). MIT Press.
- Hasfi, N., Usmand, S., & Santosa, H. P. (2018). Anonimitas di Media Sosial : Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi ?. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 28–38.
- Hayes, A. F., Glynn, C. J., & Shanahan, J. (2017). Validating the Willingness to Self-Censor Scale: Individual Differences in the Effect of the Climate of Opinion on Opinion Expression. *International Journal of Public Opinion Research*, 17(4), 443–455.

- <https://doi.org/10.1093/ijpor/edh072>
- Hermawan, N. F. S., Baiti, H. F. N., Talitha, M. K., Ramadina, Wulandari, L. A., Dienalhaqqi, T., Pudyastuti, S. S., Akbar, A. H., & Aritonang, A. V. (2026). Demokrasi di Mata Generasi Z: Antara Ruang Kebebasan dan Bayang-bayang Kekuasaan. *Jurnal Mediasi*, 5(1), 75–81.
- Hernawati, & Putri, R. D. (2025). The Role of Fear of Negative Evaluation to Self-disclosure on Social Media Among Emerging Adults. *The International Conference Of Psychology 2025, KnE Social Sciences*, 2, 72–89. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i25.19889>
- Ihzan, M. (2025). Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Bereksprei di Media Sosial [The Impact of the ITE Law on Freedom of Expression on Social Media]. *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 25–32.
- Indrawan, J., Barzah, R. E., & Simanihuruk, H. (2023). Instagram Sebagai Media Komunikasi Politik Bagi Generasi Milenial. *Eksprei Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 170–179. <https://dx.doi.org/10.33822/jep.v6i1.4519>
- Juditha, C. (2025). The Phenomenon of “Indonesia Gelap” on Social Media: Sentiment Analysis and Public Opinion Polarization (Fenomena “Indonesia Gelap” di Media Sosial: Analisis Sentimen dan Polarisasi Opini Publik). *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 157–170. <https://dx.doi.org/10.24912/jk.v17i1.33846>
- Kartodinoto, R. S. R. A., Purnomo, D., & Utomo, A. W. (2024). Analisis Instagram Sebagai Ruang Publik Terhadap Respon Generasi-Z Dalam Kontestasi Pilpres 2024 (Studi Pada Generasi-Z Di Kota Salatiga). *Jurnal Niara*, 17(1), 20–29.
- Nurlatifah, M., Sarwono, B., & Irwansyah. (2020). Perspektif Normatif pada Jurnalisme Digital. *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia*, 1(2), 98–113.
- Prihantoro, E., Damintana, K. P. I., & Ohorella, N. R. (2020). Self Disclosure Generasi Milenial melalui Second Account Instagram. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 312–323. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3919>
- Purnama, A., & Hernawan, W. (2025). Analisis Gerakan Petisi Civitas Akademika Alam Teori Spiral Of Silence. *Journal Media Public Relations*, 5(1), 129–137.
- Putri, Y. M. A., Koho, I. R., Ulfah, Setiani, A., Nurhalim, A. D., & Syafitri, C. Al. (2026). Spiral Of Silence Di Media Sosial : Reinterpretasi. *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)*, 7(1), 286–297. <https://doi.org/10.36085/j-sikom.v7i1.10373>
- Rachmawati, A., & Nurhamida, Y. (2018). Dukungan Sosial Teman Virtual Melalui Media Instagram pada Remaja Akhir. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan (JIPT)*, 06(01), 111–130.
- Rahmad, W. O. D. C., Mau, M., & Akbar, M. (2025). Self-Disclosure Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Instagram: Studi Kualitatif tentang Ekspresi Diri di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA)*, 12(1), 9–15. <https://doi.org/10.31294/jika.v12i1.11582>
- Ridho, M. R., & Saepudin. (2024). Komunikasi Interpersonal Generasi Z dan Generasi Milenial Dalam Mengekspresikan Diri Di Media Sosial Instagram. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 239–246. <https://doi.org/10.62017/arima>
- Riyanti, A. J. R., Mulia, M. D., Arini, Sununianti, V. V., Istiqomah, & Kurniawan, D. A. (2026). Spiral Of Silence di Era Digital : Ketakutan Berpendapat di Media Sosial Dalam Konteks Kebebasan Bereksprei di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 5747–5754. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6226>
- Safira, N., Khofifah, & Razzaq, A. (2025). Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik : Studi Kasus Keracunan Massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di X (Twitter). *Jurnal Teknologi Pembelajaran Interaktif (JTPI)*, 5(4), 101–113. <https://journalversa.com/s/index.php/jtpi>
- Simamora, R. M., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Sianturi, J. A., Banurea, A. M. A., Limbong, S. S. M. B., Junita, A., Rajagukguk, & Maulita, T. (2025). Pengaruh Anonimitas di Media Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat dan Tanggung Jawab Hukum Studi Kasus : (Analisis Kasus Akun Fufufafa dalam Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Twitter). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4647–4652. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1050>
- Sutono, A., & Noorzeha, F. (2025). Hak Warga Negara dalam Bersosial Media : Meninjau Kembali Penjabaran Nomokrasi dan Demokrasi di Indonesia. *PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 5(2), 189–200.
- Wahyudi, R., & Nugroho, H. (2022). Mengaburnya Ruang Publik dan Ruang Privat dalam Praktik Konsumsi Media Baru (Blurring of Public and Private Spaces in New Media Consumption Practices). *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 101–112. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss2.art1>
- We are social. (2025). *Digital 2026: Top digital and social media trends in Indonesia*.

Wearesocial.Com. <https://wearesocial.com/id/blog/2025/11/digital-2026-top-digital-and-social-media-trends-in-indonesia/>

Zumiarti, & Surya, R. (2023). Penerapan Teori Self Disclosure Pada Generasi Milenial (Pemilik Second Account Instagram). *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)*, 4(1), 74–83.